

# HUBUNGAN KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL KEPALA SEKOLAH, KINERJA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TERHADAP STATUS AKREDITASI DI SMK NEGERI SE-KOTA JAYAPURA

DIKI KURNIAWAN, ABDUL KARIM

Universitas Cenderawasih

Email: [dikikurniawan84@gmail.com](mailto:dikikurniawan84@gmail.com), [abdulkarim64@gmail.com](mailto:abdulkarim64@gmail.com)

## **Abstract:**

*This study aims to determine the relationship of transformational leadership of school principals, performance of educators and education personnel to the status of accreditation in state Vocational Schools in Jayapura City. The city of Jayapura totaling 78. Data analysis techniques using multiple correlation, and the coefficient of determination to find out the percentage of the relationship. The results showed that there was no relationship between the transformational leadership of the principal and accreditation status, there was no relationship between the performance of educators and the status of accreditation. education, there is no relationship between the performance of the teaching staff and the status of accreditation, there is no relationship between the transformational leadership of the school principal, the performance of the teaching staff and the teaching staff with the status of accreditation*

**Keywords:** Transformational Leadership, Teacher Performance, Educational Workforce Performance, Accreditation Status

## PENDAHULUAN

P erkembangan zaman yang sangat pesat dan adanya tuntutan untuk dapat menyesuaikan diri agar dapat bersaing di era revolusi industri 4.0 maka menuntut berbagai jenis pendidikan di Indonesia agar dapat menghasilkan lulusan yang bermutu atau berkualitas. Salah satu jenis pendidikan yang diakui pemerintah seperti sekolah menengah kejuruan (SMK). Untuk mengetahui mutu pendidikan di sekolah, maka pemerintah mengadakan kegiatan akreditasi.

Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program pada satuan pendidikan dengan kriteria yang telah ditetapkan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003). Oleh karena itu, satuan pendidikan dituntut untuk melakukan akreditasi sebagaimana peraturan yang berlaku, hal ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan program di satuan pendidikan. Tujuan akreditasi adalah penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan. Pelaksanaan kegiatan akreditasi merupakan bentuk tanggungjawab pemerintah terhadap mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh badan akreditasi nasional (Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018)

Untuk memperoleh status akreditasi, sekolah harus mengajukan akreditasi melalui Sispena BAN S/M dengan mengunggah beberapa dokumen yang diminta.

Sekolah akan mendapatkan status akreditasi berupa A, B dan C, hal ini sesuai dengan Permendikbud Nomor 005/H/AK/2017. Status tersebut dilihat dari rekapitulasi hasil penilaian asesor dari sisi administrasi dan implementasi kegiatan sekolah seperti perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang mencakup 8 standar antara lain standar kelulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian (Permendikbud Nomor 34 Tahun 2018). Status akreditasi sekolah dapat diartikan semakin tinggi mutu pendidikannya maka semakin tinggi nilainya. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari kepala sekolah, tenaga kependidikan dan tenaga pendidik untuk dapat memperoleh status akreditasi yang diharapkan karena merupakan cerminan mutu pendidikan di sekolah tersebut.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan maka diperlukan pemimpin yang dapat mempengaruhi bawahan untuk mencapai tujuan sekolah serta dapat meningkatkan budaya mutu di lingkungan sekolah. Menurut Danim (2008) bahwa untuk menjawab permasalahan berkaitan dengan mutu pendidikan maka diperlukan pola kepemimpinan transformasional, yakni kepemimpinan yang memiliki penekanan dalam pernyataan visi dan misi yang jelas, penggunaan komunikasi yang efektif, pemberian rangsangan intelektual, serta perhatian pribadi terhadap permasalahan individu anggota organisasinya. Sedangkan menurut Bass yang dikutip oleh Wukir (2013) bahwa kepemimpinan transformasional pemimpin yang dapat menggerakkan pengikutnya langsung melampaui kepentingan pribadi melalui pengaruh ideal (karisma), inspirasi, rangsangan intelektual atau pertimbangan individual. Selain itu menurut Anderson bahwa kepemimpinan *transforming* adalah visi, perencanaan, komunikasi dan tindakan kreatif yang mempunyai efek positif pemersatu pada sekelompok orang dalam sebuah susunan nilai dan kepercayaan yang jelas untuk mencapai tujuan yang jelas dan terukur (Wukir, 2013). Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan transformasional dapat mempengaruhi mutu pendidikan, hal ini diperkuat dengan adanya hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Maris (2016) yang menyatakan bahwa pengaruh kepemimpinan transformasional kepala sekolah terhadap mutu sekolah pada SD Negeri terakreditasi A di kabupaten Cianjur diperoleh sebesar 0,700 (korelasi kuat), sedangkan pengaruhnya 49%. Artinya kepemimpinan transformasional kepala sekolah berpengaruh signifikan terhadap mutu sekolah.

Dengan demikian kepala sekolah yang memiliki gaya kepemimpinan transformasional diharapkan dapat meningkatkan sistem kinerja bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Hal ini akan mempengaruhi sisi administrasi dan tata kerja yang baik, sehingga dokumen yang diminta dalam akreditasi menjadi ada, sesuai dan lengkap.

Selain itu, untuk meningkatkan mutu pendidikan diperlukan adanya kinerja pendidik dan tenaga kependidikan yang baik. Kinerja tenaga pendidik dan tenaga

kependidikan sangat mempengaruhi mutu pendidikan. Kata kinerja merupakan terjemahan dari kata *performance*, yang secara etimologi berasal dari kata *to perform* yang berarti menampilkan atau melaksanakan (Wukir, 2013). Menurut Bernardin dan Russel yang dikutip oleh Wukir (2013), kinerja adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu. Sedangkan menurut Mangkunegara (2000), kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang tercapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Wukir, 2013)

Wujud perilaku kinerja pendidik yang dimaksud adalah kegiatan guru dalam proses pembelajaran, yaitu bagaimana seorang guru merencanakan pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran dan menilai hasil belajar (Mulyasa, 2013). Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Maris (2016) bahwa pengaruh kinerja guru terhadap mutu sekolah pada SD Negeri terakreditasi A di Kabupaten Cianjur diperoleh sebesar 0,709 (korelasi kuat), sedangkan pengaruhnya sebesar 50,2%. Berdasarkan temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja guru berpengaruh signifikan terhadap mutu sekolah.

Di samping itu, Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Standar kompetensi guru dikembangkan secara utuh ke dalam empat kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Mengacu kepada peraturan tersebut, maka seorang guru bukan hanya membuat rencana pembelajaran, melaksanakannya serta melakukan penilaian kepada peserta didik bahkan seorang guru dituntut harus memiliki pribadi yang baik, memiliki jiwa yang tinggi, memahami peserta didik dan memahami materi yang akan diajarkan kepada peserta didik beserta administrasinya.

Guru yang mempunyai kualitas kinerja yang baik akan memperoleh dukungan dari pemimpin/kepala sekolahnya, sehingga ia mau berusaha untuk meningkatkan prestasi kerjanya, dengan demikian kinerja guru atau tenaga pendidik yang baik maka akan berpengaruh kepada beberapa dokumen yang diminta di sispena BAN S/M dalam pengajuan akreditasi sekolah. Selain itu, pelaksanaan pembelajaran berjalan dengan baik dan memperoleh *output* yang baik.

Di samping itu, jika dilihat dari sisi administrasi sekolah, maka kinerja tenaga kependidikan sangat penting. Tenaga kependidikan merupakan anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS. Tenaga kependidikan antara lain kepala sekolah, pengawas, tenaga perpustakaan dan tenaga administrasi (tata usaha).

Tenaga kependidikan bertugas dalam administrasi sekolah sering disebut tata usaha. Menurut Permendiknas Nomor 24 Tahun 2008 bahwa tugas tata usaha antara lain melaksanakan administrasi kepegawaian, melaksanakan administrasi

keuangan, melaksanakan administrasi sarana dan prasarana, melaksanakan administrasi hubungan masyarakat dan sekolah, melaksanakan administrasi persuratan dan pengarsipan, melaksanakan administrasi kesiswaan, melaksanakan administrasi kurikulum, melaksanakan administrasi layanan khusus, menerapkan TIK, mendukung pengelolaan SNP, menyusun program dan laporan kerja, mengorganisasikan staf, mengembangkan staf, mengambil Keputusan, menciptakan iklim kerja yang kondusif, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, membina staf, mengelola konflik, dan membuat laporan. Mengacu kepada tugas tersebut maka tenaga pendidikan sangat penting guna menunjang pelaksanaan pendidikan.

Berdasarkan uraian di atas maka menarik untuk diteliti tentang kontribusi kepemimpinan transformasional kepala sekolah dan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan dalam memperoleh status akreditasi di sekolah menengah kejuruan di Kota Jayapura.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui angket yang disebar ke sekolah-sekolah yang termasuk lokasi penelitian dan ditujukan kepada pendidik, dan tenaga kependidikan. Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelusuran terhadap hasil-hasil penelitian maupun referensi-referensi yang terkait dengan penelitian. Populasi dari penelitian ini adalah Sekolah menengah kejuruan yang berstatus negeri dan berada di Kota Jayapura dengan jumlah 10 satuan pendidikan yang tersebar di berbagai distrik se-Kota Jayapura. Adapun sampel yang digunakan untuk penelitian ini berdasarkan perwakilan distrik. Sekolah yang dijadikan sampel yang berjumlah 4 sekolah antara lain SMK N 7 Kota Jayapura, SMK N 8 Kota Jayapura, SMK N 10 Kota Jayapura dan SMK N 3 Kota Jayapura. Untuk menguji kuesioner atau angket penelitian maka peneliti melakukan uji coba, yaitu uji coba validitas dan uji coba reabilitas. Pengolahan data dalam penelitian ini, dilakukan beberapa analisis data secara kuantitatif dengan menggunakan alat uji statistik sebagai berikut, yaitu: uji korelasi product moment, dan uji regresi.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Gambaran umum mengenai variabel kepemimpinan transformasional kepala sekolah yang dijabarkan ke dalam 4 unsur yakni pengaruh ideal (karisma), motivasi inspirasi, rangsangan intelektual dan pertimbangan individual memiliki rata-rata sebesar 84,60 dengan standar deviasi 12,27 yang termasuk kategori tinggi. Berdasarkan analisa data diperoleh bahwa skor tertinggi 104 dan skor terendah adalah 60 dengan jumlah responden sebanyak 78 orang.

Deskripsi mengenai variabel kinerja pendidik sekolah menengah kejuruan di Kota Jayapura yang telah dianalisa memiliki rata-rata sebesar 174,4 dengan

standar deviasi 27.1 dapat dikategorikan sangat tinggi. Perolehan skor tertinggi adalah 208 dan terendah adalah 52 dengan jumlah responden sebanyak 78 orang.

Gambaran umum tentang variabel kinerja tenaga kependidikan sekolah menengah kejuruan di Kota Jayapura memiliki rata-rata 65,7 dengan standar deviasi 25,2 dapat dikategorikan rendah. Perolehan skor tertingginya adalah 116 dan skor terendah adalah 26 dengan jumlah responden sebanyak 78 orang.

Deskripsi mengenai status akreditasi sekolah menengah kejuruan di Kota Jayapura memiliki rata-rata 85,5 dengan standar deviasi 24,5 dapat dikategorikan sangat tinggi. Sedangkan perolehan skor tertingginya adalah 99 dan skor terendah adalah 33 dengan jumlah responden 78 orang.

Berdasarkan perolehan data yang telah dilakukan pada 78 responden yang terdiri dari pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah kejuruan yang berstatus negeri di Kota Jayapura dengan menggunakan SPSS 16 dapat dinyatakan sebagai berikut

- a. Tidak adanya hubungan antara kepemimpinan transformasional kepala sekolah dengan status akreditasi, hal ini berdasarkan variabel kepemimpinan transformasional ( $X_1$ ) terhadap status akreditasi (Y) dengan nilai sig = 0,589. Disebabkan menggunakan uji dua sisi, maka nilai  $\alpha/2$ , sehingga nilai  $\alpha = 0,05/2 = 0,025$ . Berdasarkan hasil tersebut maka diperoleh Sig >  $\alpha = 0,589 > 0,025$  artinya  $H_0$  diterima.
- b. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kinerja pendidik terhadap status akreditasi sekolah, hal ini berdasarkan variabel kinerja pendidik ( $X_2$ ) terhadap status akreditasi (Y) dengan nilai sig = 0,047. Dikarenakan menggunakan uji dua sisi, maka nilai  $\alpha/2$ , sehingga nilai  $\alpha = 0,05/2 = 0,025$ . Berdasarkan hasil tersebut maka diperoleh Sig >  $\alpha = 0,047 > 0,025$  artinya  $H_0$  diterima.
- c. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kinerja tenaga kependidikan terhadap status akreditasi sekolah, hal ini berdasarkan variabel kinerja kependidikan ( $X_3$ ) terhadap status akreditasi (Y) dengan nilai sig = 0,654. Dikarenakan menggunakan uji dua sisi, maka nilai  $\alpha/2$ , sehingga nilai  $\alpha = 0,05/2 = 0,025$ . Berdasarkan hasil tersebut maka diperoleh Sig >  $\alpha = 0,654 > 0,025$  artinya  $H_0$  diterima.
- d. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kepemimpinan transformasional kepala sekolah, kinerja pendidik dan tenaga kependidikan dengan status akreditasi sekolah, hal ini berdasarkan variabel kepemimpinan transformasional kepala sekolah ( $X_1$ ), kinerja pendidik ( $X_2$ ) dan kinerja kependidikan ( $X_3$ ) terhadap status akreditasi (Y) dengan nilai sig = 0,097. Dikarenakan menggunakan uji dua sisi, maka nilai  $\alpha/2$ , sehingga nilai  $\alpha = 0,05/2 = 0,025$ . Berdasarkan hasil tersebut maka diperoleh Sig >  $\alpha = 0,097 > 0,025$  artinya  $H_0$  diterima.

Hasil penelitian tentang variabel kepemimpinan transformasional kepala sekolah menunjukkan rata-rata 84,60 yang dapat dikategorikan tinggi, hal ini berarti kepala sekolah sudah menjalankan kepemimpinan transformasional yang meliputi

4 hal yakni pengaruh ideal (karisma), motivasi inspirasi, rangsangan intelektual dan pertimbangan individual. Kepala sekolah SMK sudah menunjukkan adanya jiwa kepemimpinan transformasional yang diakui oleh pendidik dan tenaga kependidikan yang dapat mengarahkan warga masyarakat untuk mengikutinya. Hal ini sejalan dengan pendapat Robbins (1998) yakni seorang pemimpin dapat mempengaruhi kelompoknya untuk mencapai tujuan.

Kinerja menurut Mangkunegara (2000) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang tercapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Wukir, 2013). Hasil penelitian kinerja pendidik menunjukkan rata-rata 174,4 yang dapat dikategorikan sangat tinggi. Hal ini memberikan gambaran bahwa tenaga pendidik SMK mempunyai prestasi yang tinggi. Merujuk dari gambaran umum tentang kinerja pendidik maka tenaga pendidik sudah menjalankan peranannya dalam proses belajar mengajar antara lain sebagai demonstrator, pengelola kelas, mediator dan *fasilitator, evaluator*, pengadministrasian, pribadi, psikologi (Usman, 2011).

Selain itu, hasil penelitian mengenai kinerja tenaga kependidikan memperoleh rata-rata 66,7 yang dapat dikategorikan rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tenaga kependidikan SMK masih rendah dan akan memberikan dampak kepada hasil tugas-tugas yang diemban kurang optimal dan efektif.

Satuan pendidikan yang mempunyai pemimpin yang dapat memberikan pengaruh kepada warga sekolah dan didukung adanya kinerja yang baik dari tenaga pendidik dan kependidikan, maka akan memberikan kontribusi yang positif bagi pelaksanaan kegiatan sekolah.

Berdasarkan tabel model *summary* melalui aplikasi SPSS 16 diperoleh besarnya hubungan antara kepemimpinan transformasional kepala sekolah, kinerja pendidikan dan tenaga kependidikan terhadap status akreditasi sebesar 0,285. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh yang lemah. Namun hasil pengujian signifikan menunjukkan tidak adanya hubungan dari variabel-variabel penelitian.

Kepemimpinan transformasional kepala sekolah, kinerja pendidik dan kinerja tenaga kependidikan belum memberikan sumbangan/kontribusi terhadap perolehan status akreditasi sekolah di SMK Negeri Kota Jayapura. Hal ini bertentangan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Danim (2009) bahwa untuk menjawab permasalahan berkaitan dengan mutu pendidikan maka diperlukan pola kepemimpinan transformasional, yakni kepemimpinan yang memiliki penekanan dalam pernyataan visi dan misi yang jelas, penggunaan komunikasi yang efektif, pemberian rangsangan intelektual, serta perhatian pribadi terhadap permasalahan individu anggota organisasinya. Selain itu, hasil penelitian yang dikemukakan oleh Maris (2016) yang menyatakan bahwa kepemimpinan transformasional dan kinerja pendidik memberikan kontribusi terhadap mutu pendidikan.

Keberhasilan kegiatan akreditasi sekolah bukan hanya dibebankan kepada kepala sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan melainkan dukungan dari seluruh

civitas akademik yang berada di sekolah menengah kejuruan bahkan dinas pendidikan yang membawahi sekolah tersebut. Salah satu bentuk dukungan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan dalam kegiatan akreditasi yakni melengkapi dan memenuhi instrument akreditasi SMK.

Sekolah yang sudah melaksanakan akreditasi akan mendapatkan status akreditasi berupa terakreditasi dan tidak terakreditasi. Peringkat terakreditasi berupa A, B, dan C sedangkan peringkat tidak terakreditasi berupa tidak terakreditasi (Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018). Adanya status akreditasi ini menunjukkan bahwa sekolah yang memenuhi standar nasional pendidikan, maka akan semakin tinggi nilainya. Hal ini sesuai dengan kriteria dalam Permendikbud nomor 005/H/AK/2017 yakni peringkat akreditasi A jika sekolah mendapatkan nilai akhir 91 sampai dengan 100, peringkat akreditasi B jika sekolah memperoleh nilai akhir 81 sampai dengan 90 dan peringkat akreditasi C jika sekolah mendapatkan nilai akhir 71 sampai dengan 80 bagi sekolah memperoleh nilai akhir akreditasi di bawah 71, maka peringkat yang disandang adalah tidak terakreditasi.

**Tabel 1. Sebaran Skor Penilaian Setiap Standar (Permendikbud Nomor. 005/H/AK/2017)**

Komponen Akreditasi	Skor Butir maksimum	Jumlah Bobot butir	Jumlah Skor Tertimbang Maksimum
Standar isi	4	33	132
Standar proses	4	67	268
Standar kompetensi lulusan	4	26	104
Standar pendidik dan Tendik	4	70	280
Standar sarana dan prasarana	4	71	284
Standar pengelolaan	4	52	208
Standar pembiayaan	4	50	200
Standar penilaian pendidik	4	46	184

Keterangan: (\*) Jumlah Skor Tertimbang Maksimum = Skor Butir Maksimum x Jumlah Bobot Butir

Merujuk dari Tabel 1 skor setiap butir dapat digambarkan bahwa terdapat standar dalam komponen akreditasi yang perlu adanya dukungan dari dinas pendidikan yakni bantuan sarana dan prasarana, pembiayaan dan pengelolaan. Disamping itu terdapat persyaratan yang wajib dipenuhi oleh sekolah jika mau mendapatkan status akreditasi walaupun komponen akreditasi lainnya mendapatkan nilai maksimal, adapun persyaratannya yang sesuai dengan Permendikbud nomor 005/H/AK/2017 yaitu: (1) Memperoleh nilai akhir hasil akreditasi sekurang-kurangnya 71; (2) Memperoleh nilai komponen standar sarana dan prasarana tidak kurang dari 61; (3) Tidak ada nilai komponen standar di bawah 50.

Hasil akhir penilaian akreditasi di sekolah berasal dari penggabungan nilai standar 1 hingga standar 8 yakni standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian pendidikan dan standar sarana prasarana. Disamping itu, perbedaan penilaian akreditasi untuk sekolah menengah kejuruan dibandingkan dengan sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas terletak diprogram yang dilaksanakan oleh sekolah, awalnya penilaiannya hanya dilakukan setiap program namun berdasarkan kebijakan baru bahwa hasil akhir penilaian akreditasi SMK berdasarkan rekapitulasi hasil akhir semua program yang dilaksanakan (Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018).

Faktor lain yang mempengaruhi perolehan status akreditasi, ditentukan oleh penilaian asesor. Asesor adalah tenaga profesional yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat dan ditugasi oleh BAN untuk melakukan penilaian terhadap kelayakan satuan pendidikan sebagai bagian dari proses akreditasi (Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018). Penilaian yang dilakukan oleh asesor mengacu kepada standar nasional pendidikan sekolah menengah kejuruan (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018) dan Permendikbud Nomor 005/H/AK/2017 tentang kriteria dan peringkat akreditasi sekolah menengah kejuruan (SMK).

Kepemimpinan transformasional yang dilaksanakan oleh kepala sekolah harus diwujudkan dengan bentuk fisik dan diimplemenatsikan dalam bentuk kinerja yang dapat dilihat oleh asesor bukan hanya sikap namun fisiknya harus terlihat. Selain itu, kinerja pendidik dan tenaga kependidikan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran, program semester, program tahunan dan lainnya karena asesor akan melihat dan menilai kesesuaian dengan peraturan yang berlaku dan instrumen penilaian akreditasi SMK (Permendikbud Nomor 005/H/AK/2017).

Oleh karena itu, kepala sekolah dituntut untuk dapat memberikan contoh dan bimbingan kepada pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan kinerja yang sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti mengadakan supervisi pembelajaran, supervisi pendidikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan.

Maka dapat disimpulkan bahwa diperlukan manajemen yang baik dilakukan oleh kepala sekolah seperti melaksanakan supervisi pembelajaran untuk melihat sejauh mana kinerja pendidik dan tenaga kependidikan dikelas dan di kantor.

## **PENUTUP/SIMPULAN**

Status akreditasi sekolah diperoleh berdasarkan hasil rekapitulasi setiap standar nasional pendidikan yakni standar proses, standar isi, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidik, bukan hanya unsur pimpinan sekolah dan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan



namun seluruh komponen yang terlibat dalam pendidikan seperti dinas pendidikan, orang tua siswa dan kebijakan pendidikan. Kepemimpinan transformasional tidak mempunyai hubungan dengan status akreditasi sekolah, hal ini menunjukkan bahwa hipotesa tentang adanya hubungan antara kepemimpinan transformasional dengan status akreditasi ditolak. Kinerja pendidik tidak mempunyai hubungan dengan status akreditasi sekolah, hal ini menyatakan bahwa hipotesa hubungan antara kinerja pendidik dengan status akreditasi dapat ditolak. Kinerja tenaga kependidikan tidak mempunyai hubungan dengan dengan status akreditasi, hal ini menyatakan bahwa hipotesa hubungan antara kinerja tenaga kependidikan dengan status akreditasi sekolah dapat ditolak. Kepemimpinan transformasional kepala sekolah, kinerja tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dengan status akreditasi sekolah tidak mempunyai hubungan, hal ini menyatakan bahwa hipotesa hubungan Kepemimpinan transformasional kepala sekolah, kinerja tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dengan status akreditasi sekolah ditolak.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti merekomendasikan beberapa hal, antara lain: (1) Dinas pendidikan provinsi papua yang membawahi seluruh SMK di Papua sebaiknya dalam memberikan bantuan harus mengacu kepada standar nasional pendidikan atau standar minimal pelayanan; (2) Kepala sekolah harus melakukan supervisi pendidikan yang continue kepada pendidik dan tenaga kependidikan terkait kinerja atau tugas dan fungsinya serta mengacu kepada peraturan yang berlaku; (3) Kepala sekolah menciptakan suasana yang kondusif di sekolah sehingga kinerja pendidik dan tenaga kependidikan menjadi lebih baik; (4) Kepala sekolah dalam mengelola sekolah harus mengacu kepada standar nasional pendidikan sekolah menengah kejuruan dan instrument akreditasi sekolah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Danim, Sudarwan dan Suparno. (2009). *Manajemen dan Kepemimpinan Transformasional Kekepalasekolahan Visi dan Strategi Sukses Era Teknologi, Situasi Krisis dan Internasionalisasi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Maris, Intan Silviana, dkk. (2016). *Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah, Kinerja Guru dan Mutu Sekolah*, <https://ejournal.upi.edu/index.php/JAPSPs/article/view/5645>
- Mulyasa. E., (2013). *Uji Kompetensi dan Penilaian Kinerja Guru*. Bandung: PT. Rosdakarya
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal. [https://banpaudpnf.kemdikbud.go.id/upload/download-center/Permendikbud%20No.%2013%20Tahun%202018%20tentang%20BAN-SM%20dan%20\\_1538451668.pdf](https://banpaudpnf.kemdikbud.go.id/upload/download-center/Permendikbud%20No.%2013%20Tahun%202018%20tentang%20BAN-SM%20dan%20_1538451668.pdf)

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan. <https://bsnp-indonesia.org/standar-nasional-pendidikan-sekolah-menengah-kejuruan-madrasah-aliyah-kejuruan/>
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Adminstrasi Sekolah/Madrasah. <http://repositori.kemdikbud.go.id/4796/>
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 005/H/AK/2017 tentang kriteria dan peringkat akreditasi sekolah menengah kejuruan (SMK) <http://psmk.kemdikbud.go.id/konten/2541/perangkat-akreditasi-smk>
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru <http://vervalsp.data.kemdikbud.go.id/prosespembelajaran/file/Permendiknas%20No%2016%20Tahun%202007.pdf>
- Robbins, SP & Judge. (2007). *Perilaku Organisasi*, alih bahasa Drs. Benyamin Mola. Jakarta: Salemba.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS, Bandung: Fermana. 2006
- Usman, Moh Uzer. (2011). *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Wukir. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Organisasi Sekolah*. Yogyakarta: Multi Presindo.